

## RINGKASAN

Kebijakan sistem zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan radius dan jarak. Sistem zonasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan di banyak daerah. Kebijakan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketimpangan penerimaan calon peserta didik SMP dimana tidak terjadi pemerataan peluang untuk bisa diterima di zona 1. Hal tersebut terjadi karena tidak meratanya jumlah sekolah SMP Negeri di tiap desa/kelurahan dan daya tampung di setiap sekolah dengan jumlah calon peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di Kabupaten Banyumas serta menganalisis aspek-aspek keadilan sosial dalam penerapan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sasaran dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Kepala Sekolah, Panitia Pelaksana PPDB Sekolah, dan masyarakat/wali murid. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2023 tingkat SMP di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik dengan adanya perubahan ketentuan zona yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga siswa yang tertampung lebih banyak serta sudah memenuhi aspek-aspek keadilan sosial dalam memberikan pelayanan walaupun belum secara optimal. Pada aspek partisipasi masyarakat diketahui bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Kemudian pada aspek tanggung jawab Dinas Pendidikan terhadap efektivitas program mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat belum adil dan merata. Sedangkan aspek daya tanggap, persamaan hak, dan pilihan masyarakat sudah memenuhi aspek-aspek keadilan sosial dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Banyumas.

Kata kunci: Kebijakan Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kebijakan Publik.

## SUMMARY

The zoning system policy is a new student admission system based on radius and distance. This zoning system aims to overcome the problems of education in Indonesia, namely unequal access and quality of education in many regions. This policy is regulated in Permendikbud Number 1 of 2021 concerning the admission of new students at the kindergarten, elementary, junior high, high school, vocational school, or other equivalent forms.

The location of this research is in Banyumas Regency, Central Java. This study was motivated by the inequality of junior high school admission where there was no equal opportunity to be accepted in zone 1. This occurs because of the uneven number on public junior high schools in each village/sub-district and the capacity of each school with the number of prospective students. The purpose of this research is to describe the implementation of the zoning system policy in the admission of new students at the junior high school level in Banyumas Regency and to analyze the aspects of social equity in the implementation of the zoning system policy in the admission of new students at the junior high school level in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. The targets in this research were the apparatus of the Banyumas Regency Education Office, the Principal, the School PPDB Organizing Committee, and the community/guardians of students. The selection of informants used purposive sampling technique, while data collection was carried out by interview, observation, and documentation.

The implementation of the New Learner Admission (PPDB) zoning system in 2023 at the junior high school level in Banyumas Regency has been going well with changes in the zone provisions set by the Regional Government so that more students are accommodated and has fulfilled aspects of social equity in providing services, although not optimally. In the aspect of community participation, it is known that there is still a lack of community participation in decision-making and a lack of massive socialization to the community. Then in the aspect of the responsibility of the Education Office for the effectiveness of the program regarding the impact felt by the community, it is not fair and equitable. Meanwhile, the aspects of responsiveness, equal rights, and community choice have fulfilled the aspects of social equity in the implementation of the PPDB zoning system at the junior high school level in Banyumas Regency.

**Keywords:** Zoning System Policy, New Student Admission (PPDB), Public Policy.